

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi, salah satu teori akuntansi terkemuka, memberikan pemahaman bahwa keselarasan antara norma-norma yang dianut oleh organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kontrak sosial (Rokhlinsari, 2020). Menurut Dowling dan Pfeffer (1975, dikutip dalam Hardianti, 2017), hak investor dan hak publik perlu diperhatikan agar tidak timbul *legitimacy gap* yang artinya ada perbedaan konkret maupun laten dalam kedua sistem nilai tersebut sehingga timbul ancaman terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.

Potensi strategis bagi perkembangan perusahaan didorong oleh pengakuan publik dan legitimasi dari pihak eksternal, serta pemberitaan positif dari media massa yang berpengaruh terhadap *going concern* perusahaan (Kusumawardani & Sudana, 2017). Oleh karena itu, perusahaan harus secara kontinu membangun kepedulian yang tinggi untuk menyelaraskan sistem manajemen perusahaan dengan kepentingan lingkungan masyarakat sekitar (Andriana & Panggabean, 2017).

Praktik pelaporan atas kontribusi positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu loyalitas perusahaan untuk mendapat legitimasi (Kusumawardani & Sudana, 2017). Adanya teori legitimasi

mengenai pentingnya pengungkapan informasi tersebut dapat memenuhi persepsi banyak pihak bahwa segala aktivitas perusahaan telah diterima dalam masyarakat (Purnama, 2018)

2.2 Teori *Stakeholder*

Hutasuhut dan Andayani (2020) mengemukakan bahwa teori *stakeholder*, sebagai gagasan tingkah laku perusahaan (*corporate behavior*) dan kinerja sosial (*social performance*), pertama kali diungkapkan oleh Freeman (1984). Dalam seluruh keputusan yang diambil, perusahaan wajib memperhitungkan kepentingan semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang terlibat dan terkena dampak dari keputusan bisnis tersebut agar dapat mencapai kebermanfaatan bagi pihak-pihak tersebut. (Devi et al., 2017).

Berdasarkan pendapat Damayanti dan Hardiningsih (2021), skema teori kepentingan mengutamakan perusahaan dalam pelaksanaan akuntabilitas dengan melampaui ekspektasi pemegang kepentingan sehingga melahirkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual perusahaan. Devi et al. (2017) juga menjelaskan bahwa pemegang kepentingan sebagai pihak yang mempunyai kekuatan, baik besar ataupun kecil, untuk mengendalikan atau mempengaruhi sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan akan selalu dimonitor oleh perusahaan supaya kebutuhan semua pihak dapat terpenuhi.

Pada hakikatnya, Widanan dan Gunawarman (2021) menegaskan bahwa terdapat *inside stakeholder*, yaitu pihak internal yang mempengaruhi perusahaan, seperti *shareholders*, manajemen, dan karyawan. Di samping itu, ada *outside*

stakeholder sebagai pihak eksternal yang dipengaruhi perusahaan atas segala tindakan dan keputusan perusahaan. Perusahaan yang lengai terhadap hak dan kepentingan kedua pihak tersebut akan kehilangan kesempatan dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan berkelanjutan (Pisteco et al., 2020).

2.3 *Sustainability Accounting*

Manusia pasti mengharapkan skenario yang lebih baik daripada kondisi lingkungan yang penuh konflik sosial dengan alam yang sudah rusak karena ambisi masing-masing, seperti membenahi keadaan lingkungan seperti sediakala (Bebbington dan Unerman, 2014). Wujud atas kesadaran perusahaan terhadap penataan lingkungan yang lebih baik menjadi sebuah titik terang bahwa ada relasi antara tanggung jawab perusahaan dan akuntansi (Fahliyfi, 2014).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyebutkan bahwa rangkaian manifestasi tanggung jawab sosial tersebut diimplementasikan dalam laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup yang dapat menambah nilai sebuah perusahaan. *Sustainability accounting* sebagai strategi dan metode akuntansi yang terus berkembang dianggap tepat digunakan manajemen dalam menaklukkan tantangan menuju konsep keberlanjutan dengan menciptakan informasi berkualitas tinggi bagi seluruh pihak (Herzig & Schaltegger, 2006)

Konsep yang paling terkenal dan melekat pada *sustainability accounting* adalah prinsip *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh Elkington (1999, dikutip dalam Latifah, 2021). Ketiga aspek, yaitu *profit-people-planet*, membawa perilaku

etis sekaligus agitatif terhadap pelaporan *profit* yang sukses dengan memenuhi tanggung jawab pada lingkungan (*planet*), dan sosial (*people*) (Latifah, 2021).

Limijaya (2014) menyampaikan bahwa aspek *profit* lebih dari sekadar laba, tetapi merancang *fair trade* dan *ethical trade* yang memberi sinyal bahwa perusahaan harus mengelola dan mengestimasi biaya untuk mempertahankan komitmen *sustainability accounting* tersebut. Limijaya (2014) juga berpendapat bahwa aspek *people* yang perlu diperhatikan adalah interaksi positif dengan masyarakat, khususnya pemberdayaan manusia yang terlibat dalam operasi perusahaan. Aspek *planet* sendiri berarti ketersediaan perusahaan untuk melestarikan lingkungan, apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Limijaya, 2014).

Atas prinsip-prinsip tersebut, Carrol (1991, dikutip dalam Rice, 2017) mengembangkan piramida *corporate social responsibility* yang mengandung tanggung jawab ekonomi sebagai prasyarat untuk bisa bertahan dan berkembang, tanggung jawab legalitas dengan mematuhi regulasi dan hukum, tanggung jawab etika dengan memperhatikan norma-norma di masyarakat, dan tanggung jawab filantropis dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pengungkapan Sustainability Report

Rokhlinsari (2020) menyatakan bahwa aspek keuangan dari kinerja perusahaan telah reguler dilaporkan karena bersifat *mandatory*, tetapi aspek kinerja sosial dan lingkungan bukan sebuah *mandatory*. Selanjutnya, Ozili (2022) juga memaparkan bahwa banyak perusahaan yang kini terlibat dalam pelaporan berkelanjutan karena

sustainability report dianggap sebagai alat yang *powerful* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko sosial dan lingkungan dengan cara efisiensi sumber daya dan biaya kemudian dihubungkan dengan peluang-peluang keuangan.

Global Sustainability Standards Board (2016) menyatakan bahwa pelaporan keberlanjutan menggunakan praktik yang terbuka dalam pengungkapan dampak positif maupun negatif dari kontribusi ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Damayanti dan Hardiningsih (2021) mengobservasi bahwa berbagai organisasi, baik organisasi internasional maupun pemerintah Indonesia telah mengembangkan standar-standar yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaporan berkelanjutan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan penjelasan Caricasole (2019), standar yang umum digunakan adalah standar GRI yang terdiri atas beberapa edisi tahun penerbitan, seperti G1 *guidelines* tahun 2000, G2 *guidelines* tahun 2002, G3 *guidelines* tahun 2006 dengan G3.1 tahun 2011, G4 *guidelines* tahun 2013, dan GRI *Standard* tahun 2016. Selanjutnya, Caricasole (2019) menjelaskan bahwa bagi perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan setelah tahun 2018, satu paket Standar GRI yang dianjurkan untuk diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Standar universal yang diaplikasikan terdiri atas GRI 101: Landasan 2016, GRI 102: Pengungkapan Umum 2016, dan GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016.
2. Standar topik spesifik yang diaplikasikan terdiri atas GRI seri 200 untuk topik ekonomi, GRI seri 300 untuk topik lingkungan, dan GRI seri 400 untuk topik sosial.

2.5 Kinerja Keuangan

Menurut (Subramanyam, 2017), kinerja keuangan adalah kondisi yang merefleksikan keadaan keuangan perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Kinerja keuangan perusahaan muncul sebagai bentuk pencapaian dalam aspek finansial perusahaan yang berhubungan dengan pendapatan, beban, struktur utang, aset, dan hasil pengembalian investasi (Devi et al., 2020). Basis tujuan dari analisis laporan keuangan secara berkala adalah menilai kondisi kinerja perusahaan sehingga menyeragamkan pemahaman analisis atas kinerja keuangan perusahaan dengan investor di luar sana (Titman et al., 2017).

Menurut Arsita (2021), telaah informasi dalam laporan keuangan menghasilkan analisis fundamental dan menjadi bahan penalaran yang rasional bagi pemangku kepentingan. Kinerja keuangan perusahaan bergantung terhadap asumsi, metode perhitungan, kebijakan dan strategi yang disusun perusahaan, seperti pengakuan akrual atas *revenue* dan *expense* yang diperoleh dalam satu periode (Subramanyam, 2017). Menurut Hutabarat dan Puspita (2021, dikutip dalam

Hidayah, 2021) tujuan menganalisis kinerja keuangan adalah mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, dan stabilitas usaha.

2.6 Rasio Keuangan

Arsita (2021) menyebutkan bahwa rasio keuangan adalah salah satu teknik yang dianggap paling sering digunakan dan bersifat “*future oriented*” dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Menurut Harahap (2011, dikutip dalam Devi et al., 2020), rasio keuangan adalah nilai yang didapatkan dari membandingkan satu item dengan item lain dalam laporan keuangan untuk dilihat signifikansi hubungan antarkomponen tersebut. Dengan melihat signifikansi rasio keuangan tersebut, investor dapat menilai seberapa patuh perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Destiani & Hendriyani, 2021).

Dalam analisis kinerja keuangan, seluruh rasio yang saling dihubungkan secara komprehensif dapat menyuguhkan penilaian yang tepat dan pengambilan keputusan yang memadai untuk pemangku kepentingan (Cahya et al., 2021). Titman et al. (2017) menjelaskan ada empat kategori rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio efisiensi manajemen aset, dan rasio profitabilitas.

2.6.1 Rasio Likuiditas

Dalam menjawab pertanyaan dasar atas kesehatan finansial suatu perusahaan, rasio likuiditas dapat menggambarkan bahwa bisnis yang likuid adalah perusahaan yang mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo (Destiani & Hendriyani, 2021). Menurut Titman (2017), analisis yang dilakukan adalah menghitung secara keseluruhan likuiditas dan menganalisis likuiditas untuk *accounts receivable* dan *inventory*.

Dengan berfokus pada analisis keseluruhan likuiditas, perhitungan yang diasumsikan adalah seberapa cepat dan mudah aset lancar untuk dikonversi ke kas untuk membayar liabilitas jangka pendek (Palepu & Healy, 2014). Jenis rasio likuiditas yang biasa digunakan perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Penilaian terhadap rasio lancar sebuah perusahaan adalah dengan membandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendeknya (Subramanyam, 2017). Menurut Titman et al. (2017), rumus dari rasio lancar adalah sebagai berikut.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Menurut Palepu & Healy (2014), analisis menyatakan bahwa *current ratio* yang lebih dari 1 dapat mengindikasikan perusahaan mampu melunasi kewajiban lancarnya. Berhubungan dengan hal tersebut, Kasmir (2018) menyatakan rasio ideal untuk rasio lancar adalah 200%.

2. Rasio Cepat (*Acid-test Ratio* atau *Quick Ratio*)

Sama halnya dengan rasio lancar, *quick ratio* menghitung kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dari aset-aset yang likuid dari perspektif yang berbeda. Berdasarkan asumsi rasio cepat, *accounts receivable* perusahaan adalah aset yang likuid karena piutang usaha dapat dikoleksi secara cepat ketika *credit worthiness* piutang usaha bagus (Palepu & Healy, 2014). Palepu dan Healy (2014) menjabarkan rumus rasio cepat.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Short-term Investment} + \text{Accounts Receivable}}{\text{Current Liabilities}}$$

Menurut Kasmir (2018, dikutip dalam Margaretha et al., 2021), rasio cepat yang lebih tinggi dari rata-rata industri, perusahaan *peer*, atau rasio ideal sebesar 150% artinya kemampuan pelunasan kewajiban jangka pendek perusahaan meningkat.

2.6.2 Rasio Solvabilitas

Rasio yang biasa juga disebut rasio struktur modal (*capital structure ratio*) ini merujuk kepada bagaimana perusahaan menempatkan kombinasi *debt* dan *equity* dalam membiayai asetnya. Strategi perusahaan dalam membiayai asetnya adalah dengan menggunakan dua tipe rasio struktur modal yaitu rasio utang dan rasio kemampuan perusahaan membayar bunga utang tersebut (Titman et al., 2017).

Rasio solvabilitas mengarah kepada utang sebagai tolak ukur utama untuk memperoleh asetnya dan dianggap *solvable* apabila dapat melunasi utang yang sebagian besar dalam jangka yang panjang. Rasio struktur modal ini juga

meyakinkan kemampuan perusahaan bertahan dalam kurun waktu yang panjang (Titman et al., 2017).

1. Rasio Utang (*Debt Ratio*)

Rasio utang menghitung persentase aset perusahaan yang dibiayai dengan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Peningkatan rasio ini baik untuk meningkatkan *leverage* perusahaan dan mendisiplinkan manajemen dalam beroperasi karena *debt* yang bersifat *tax deductible* dan *cost of debt* yang lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas. Rumus dari *debt ratio* adalah sebagai berikut (Titman et al., 2017).

$$Debt Ratio = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dengan utang dapat menjadi risiko tersendiri bagi perusahaan, seperti *financial distress* dan sulit mendapatkan pinjaman untuk pendanaan perusahaan (Titman et al., 2017). Rasio ideal untuk rasio utang ini adalah sekitar 35% (Kasmir, 2018, dikutip dalam Margaretha et al., 2021).

2. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap ekuitas mendefinisikan seberapa banyak satuan uang dari modal pemilik yang dijadikan jaminan untuk utang dalam pendanaan aset. Rasio ini juga mengukur perbandingan antara total utang dan total ekuitas. Rumus *debt to equity ratio* (DER) adalah sebagai berikut (Subramanyam, 2017).

$$Debt to Equity Ratio = \frac{Total Liabilities}{Shareholder's Equity}$$

Rasio utang terhadap ekuitas lebih tinggi maka semakin banyak pembiayaan utang yang digunakan perusahaan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham (Subramanyam, 2017). Rasio ideal untuk DER adalah 80% (Kasmir, 2018, dikutip dalam Margaretha et al., 2021).

3. Rasio Cakupan Bunga (*Times Interest Earned*)

Rasio cakupan bunga menjadi dimensi lainnya dalam rasio struktur modal untuk memperhitungkan kemampuan membayar *interest* atas *debt* perusahaan. Menurut Titman et al. (2017), perusahaan membayarkan *interest expense* sebelum membayar pajak sehingga indikator rasio cakupan bunga adalah dengan membandingkan antara *interest expense* dan *net operating income* atau *earnings before interest and taxes* (EBIT) sebagaimana terlampir sebagai berikut.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Net Operating Income atau EBIT}}{\text{Interest Expense}}$$

Rasio cakupan bunga yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan utang yang lebih besar daripada ekuitas sebagai struktur modal sehingga *interest expense* yang dibayarkan menjadi lebih tinggi (Titman et al., 2017). Rasio ideal untuk nilai rasio ini adalah sebesar 10 kali (Kasmir, 2018, dikutip dalam Fatharani, 2021).

2.6.3 Rasio Profitabilitas

Dalam menjawab pertanyaan mendasar mengenai apakah perusahaan telah menghasilkan *return* yang memadai bagi para *shareholder*, analis mengungkapkan dua perhitungan yaitu *profit margin* yang memperkirakan kemampuan untuk

mengontrol beban perusahaan dan *rates of return* yang memperkirakan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan atas investasi asetnya (Titman et al., 2017).

1. Rasio Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Perusahaan yang mengontrol *cost of goods sold* (COGS) dengan efisien dapat menampilkan rasio laba kotor yang tinggi karena laba kotor didapatkan dari *sales* dikurangi dengan COGS (Titman et al., 2017). Menurut Kasmir (2018, dikutip dalam Fatharani, 2021), rasio ideal untuk rasio laba kotor adalah 30%. Menurut Titman et al. (2017), rumus perhitungan rasio laba kotor adalah sebagai berikut.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}}$$

2. Rasio Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *net income* dari setiap penjualan digambarkan sebagai rasio laba bersih (Margaretha et al., 2021). Menurut Titman et al. (2017), rumus *net profit margin* (NPM) adalah sebagai berikut.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

Rasio yang rendah bisa mengindikasikan kemampuan perusahaan menahan beban dalam operasinya yang juga rendah. Namun, rasio laba bersih ini tidak berdiri sendiri sebagai penentu kemampuan operasional perusahaan menghasilkan laba rugi karena ada faktor yang lain, seperti investasi aset untuk meningkatkan *sales* di masa depan (Titman et al., 2017). Menurut

Kasmir (2018, dikutip dalam Margaretha et al., 2021), rasio ideal untuk rasio NPM adalah 20%.

3. Rasio Hasil Pengembalian Aset (*Return on Assets*)

Titman et al. (2017) menyimpulkan bahwa perhitungan profitabilitas adalah dengan rasio hasil pengembalian aset karena rasio ini melibatkan kemampuan perusahaan mengontrol beban dan mengefisienkan penggunaan aset dalam menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi. Menurut Palepu dan Healy (2014), rumus *return on assets* (ROA) adalah sebagai berikut.

$$Return\ on\ Assets = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets}$$

Tingkat rasio yang tinggi mendefinisikan bahwa perusahaan lebih mampu menghasilkan *income* dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk investasi aset. Jika aset yang ada mengalami *over investment* atau aset yang ada tidak menunjang penjualan, semakin kecil rasio yang dihasilkan (Palepu & Healy, 2014). Menurut Kasmir (2018, dikutip dalam Fatharani, 2021), rasio ideal untuk ROA adalah 30%.

4. Rasio Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

Kunci pertumbuhan pendapatan perusahaan adalah indikator seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan modal dari pemegang saham (Titman et al., 2017). Rasio hasil pengembalian ekuitas ini disebut juga *cost of equity* sebagai pemenuhan ekspektasi investasi para *shareholder* (Subramanyam, 2017). Berikut adalah rumus *return on equity* (ROE) berdasarkan pendapat Titman et al. (2017).

$$Return\ on\ Equity = \frac{Net\ Income}{Common\ Equity}$$

Menurut Kasmir (2018, dikutip dalam Margaretha et al., 2021), rasio *return on equity* yang tinggi atau berada pada rasio ideal sebesar 40% menampilkan kemampuan memberikan *return* yang lebih tinggi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dengan tema dan objek sama, baik terkait pengungkapan *sustainability report* atau kinerja perusahaan dengan rasio keuangan. Meskipun terdapat kesamaan, karya tulis ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Penjabaran mengenai penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Aisyah Febri Hanaan pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Kesehatan PT Phapros Tbk Dibandingkan dengan Perusahaan Farmasi Lainnya”. Penelitian ini menganalisis kinerja perusahaan dengan rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan market ratio periode 2015 – 2019. Hasil penelitian ini adalah PT Phapros Tbk mengalami performa perusahaan yang buruk karena *underperformed* pada likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas, tetapi *well performed* pada profitabilitas perusahaan. Perbedaan karya tulis penulis dengan penelitian ini adalah pada tahun analisis yang dilakukan karena karya tulis ini secara spesifik membahas kinerja keuangan perusahaan periode 2019 – 2021 yang telah terjadi pandemi Covid-19. Analisis penulis menggunakan

perbandingan rasio ideal, sedangkan penelitian ini dengan rasio industri. Selain itu, karya tulis penulis secara keseluruhan membahas analisis pengungkapan aspek nonkeuangan melalui *sustainability report* PT Phapros Tbk yang konstan mengungkapkan sejak tahun 2016.

2. Penelitian oleh A Harindra Ramzyono Harits pada tahun 2020 dengan judul “A Comparative Study Of CSR Disclosure In Sustainability Reports Between PT Kalbe Farma And PT Bio Farma To Evaluate The Intensity Of GRI Standard Compliance”. Hasil penelitian ini adalah PT Kalbe Farma mengungkapkan dengan baik untuk standar universal GRI, dan persentase pengungkapan *sustainability report* sebesar 25% dari total standar GRI. Perbedaan karya tulis penulis dengan penelitian ini adalah pada tahun analisis yang digunakan. Penelitian ini hanya menganalisis pada tahun 2017, sedangkan penulis menganalisis periode 2019 – 2021. Kedua penelitian ini menggunakan standar yang sama, yaitu GRI 2016. Selain itu, karya tulis penulis terbatas pada mengungkapkan atau tidak mengungkapkan, sedangkan penelitian ini menganalisis kualitas pengungkapan.